

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
b. bahwa dalam pelaksanaan tugas menetapkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
c. bahwa dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengoordinasikan kementerian, lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
4. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renaksi BWN-KP 2026 adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

5. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Renaksi BWN-KP 2026 disusun berdasarkan:
a. RPJP Nasional;
b. RPJM Nasional;
c. RKP; dan
d. Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan.

Pasal 3

(1) Renaksi BWN-KP 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
    a. program;
    b. kegiatan;
    c. indikasi pendanaan pada bagian anggaran kementerian/lembaga;
    d. lokasi pelaksanaan; dan
    e. instansi pelaksana.
(2) Renaksi BWN-KP 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029.
(3) Pelaksanaan Renaksi BWN-KP 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Tetap.

Pasal 4

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kebijakan dan strategi pelaksanaan meliputi:
a. pengelolaan batas wilayah negara;
b. pengelolaan aktivitas lintas batas negara; dan
c. pembangunan kawasan perbatasan.

Pasal 5

Indikasi pendanaan pada bagian anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp11.385.662.323.984 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:

a. Kementerian Dalam Negeri Rp10.473.601.000 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);
b. Kementerian Luar Negeri Rp455.017.600 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
c. Kementerian Pertahanan Rp300.771.956.000 (tiga ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
d. Kementerian Keuangan Rp2.585.000.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rp13.732.280.000 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp253.673.793.841 (dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
g. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp179.462.500.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
h. Kementerian Kesehatan Rp10.353.651.917 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
i. Kementerian Ketenagakerjaan Rp4.581.080.000 (empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
j. Kementerian Perhubungan Rp625.069.888.636 (enam ratus dua puluh lima miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
k. Kementerian Perindustrian Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
l. Kementerian Pertanian Rp949.290.161.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
m. Kementerian Sosial Rp4.291.179.950.000 (empat triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
n. Kementerian Pekerjaan Umum Rp3.929.452.860.455 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
o. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rp3.990.866.000 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
p. Kementerian Koperasi Rp4.150.000.000 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah);

q. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Rp5.647.526.000 (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
r. Kementerian Kebudayaan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
s. Kementerian Pariwisata Rp6.450.000.000 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
t. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Rp381.388.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
u. Kementerian Lingkungan Hidup Rp116.175.914.018 (seratus enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan belas rupiah);
v. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp7.083.463.000 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
w. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp822.465.000 (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
x. Kementerian Agama Rp56.331.808.000 (lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
y. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp347.002.566.125 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
z. Badan Karantina Indonesia Rp7.356.994.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
aa. Tentara Nasional Indonesia Rp221.084.343.492 (dua ratus dua puluh satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
ab. Badan Narkotika Nasional Rp576.196.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
ac. BNPP Rp1.862.101.500 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah); dan
ad. Badan Pangan Nasional Rp20.464.952.400 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

Indikasi pendanaan pada bagian anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. pengelolaan Batas Wilayah Negara sebesar Rp1.092.842.296.717 (satu triliun sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
b. pengelolaan aktivitas lintas batas negara sebesar Rp17.497.546.917 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah); dan

c. pembangunan Kawasan Perbatasan sebesar Rp10.275.322.480.350 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7

Lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp120.817.649.576 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
b. Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp118.770.386.500 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
c. Provinsi Riau dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp139.325.460.634 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
d. Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp386.414.257.889 (tiga ratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
e. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp251.749.277.790 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
f. Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp631.670.516.257 (enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
g. Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp217.137.022.465 (dua ratus tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
h. Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp2.580.257.175.656 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
i. Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp263.584.814.988 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
j. Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp20.685.020.176 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

k. Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp9.400.180.989 (sembilan miliar empat ratus juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
l. Provinsi Maluku dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp167.082.727.438 (seratus enam puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
m. Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp69.052.680.000 (enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
n. Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.488.390.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
o. Provinsi Papua Tengah dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp54.503.276.405 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima rupiah);
p. Provinsi Papua dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp87.203.085.308 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah);
q. Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp90.793.070.468 (sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
r. Provinsi Papua Selatan dan kabupaten/kota dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.157.191.935.902 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah);
s. lintas provinsi sebesar Rp32.237.548.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
t. pusat sebesar Rp4.986.297.847.543 (empat triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

Pasal 9

Renaksi PBWN-KP 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 berfungsi sebagai acuan:
a. penyusunan rencana kerja dan penganggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian Renaksi PBWN-KP 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1) BNPP melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi BWN-KP 2026.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan evaluasi.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian.

Pasal 12

Dalam hal perubahan program, kegiatan, indikasi pendanaan pada bagian anggaran, dan lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Kementerian/Lembaga harus menyampaikan hasil pemutakhiran kepada Kepala BNPP.

Pasal 13

(1) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melaporkan pelaksanaan Renaksi PBWN-KP Tahun 2026 kepada Kepala BNPP.
(2) Kepala BNPP melaporkan pelaksanaan Renaksi PBWN-KP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengarah BNPP dan Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 368

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2026

RINCIAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2026

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
I	PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA						
A	BIDANG PENYELESAIAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA						
A1	SUB BIDANG BATAS WILAYAH DARAT						
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Perundingan Bilateral Penyelesaian/Penegasan/Pemeliharaan Batas Negara RI-RDTL	1	Kesepakatan	426.904.000	APBN	Pusat	Kementerian Dalam Negeri
2.	Fasilitasi Survey Penyelesaian Permasalahan Segmen Batas Wilayah Negara, Penegasan & Pemeliharaan Batas Darat di	1	Laporan	489.452.000	APBN	Pusat	Kementerian Dalam Negeri

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Perbatasan Negara						
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Perundingan Bilateral Penyelesaian/Penegasan/Pemeliharaan Batas Negara JIM RI-Malaysia	1	Kesepakatan	433.644.000	APBN	Pusat	Kementerian Dalam Negeri
4.	Fasilitasi Penanganan Dampak Pasca Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat	1	Kegiatan	407.986.500	APBN	Pusat	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
5.	Partisipasi dalam *The Joint* Indonesia-Malaysia *Boundary Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between* Indonesia (Kalimantan Barat & Kalimantan Utara) *and* Malaysia (Sabah & Sarawak)	1	Kegiatan	17.240.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
6.	Partisipasi dalam *The Joint* Indonesia-Malaysia *Boundary Technical Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between* Indonesia (Kalimantan Barat & Kalimantan Utara) *and* Malaysia (Sabah & Sarawak)	1	Kegiatan	17.240.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
7.	Partisipasi dalam *The Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problem*	1	Kegiatan	17.240.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	on the Joint Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia (Kalimantan Barat) *and* Malaysia (Sarawak)						
8.	Partisipasi dalam *Meeting of the Co-Project Directors on Demarcation and Survey of the International Boundary between* Malaysia (Sarawak) *and* Indonesia (Kalimantan Barat)	1	Kegiatan	17.240.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
9.	Partisipasi dalam *Joint Working Group for the Common Border Datum Reference Frame and Joint Border Mapping*	1	Kegiatan	17.240.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
10.	Partisipasi dalam *General Border Committee* Indonesia-Malaysia	1	Kegiatan	17.240.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
11.	Partisipasi dalam *Joint Border Committee Meeting between the Republic of* Indonesia *and the Democratic Republic of* Timor Leste	1	Kegiatan	31.200.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
12.	Partisipasi dalam Pembentukan Forum *Special Arrangement*	1	Kegiatan	31.200.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
13.	Partisipasi dalam *Technical Sub Committee between Border*	1	Kegiatan	31.200.000	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Security between the Republic of Indonesia *and the Democratic Republik of* Timor Leste						
14.	*Partisipasi dalam Joint Border Committee Meeting, Joint Sub-Committee on Security Matters relating to Border Areas, and Joint Technical Sub-Committee on Survey and Demarcation of the Boundary and Mapping of the Border Areas between the Independent State of Papua New Guinea and the Republic of* Indonesia	1	Kegiatan	257.977.600	APBN	Pusat	Kementerian Luar Negeri
15.	Penanganan Wilayah Perbatasan darat RI-Malaysia	4	Kegiatan	286.246.000	APBN	Pusat	Kementerian Pertahanan
16.	Penanganan Wilayah Perbatasan darat RI-PNG	2	Kegiatan	144.042.000	APBN	Pusat	Kementerian Pertahanan
17.	Penanganan Wilayah Perbatasan darat RI-RDTL	1	Kegiatan	73.197.000	APBN	Pusat	Kementerian Pertahanan
A2	SUB BIDANG BATAS WILAYAH LAUT						
1.	Patroli Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia	430	Jam Operasi	111.118.575.125	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.	Patroli Mandiri Khusus	436	Jam Operasi	18.538.264.000	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
							Indonesia
3.	Patroli Mandiri Wilayah Tertentu	1	Jam Operasi	20.303.312.000	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sambang Nusa	15	Lokasi	6.123.345.800	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.	Patroli Udara Wilayah Perbatasan Laut	170	Hari Operasi	2.596.386.000	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.	Patroli Udara Wilayah Selat Malaka	115	Hari Operasi	1.639.650.000	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat Pesisir di Perbatasan Laut Dalam Gerakan Peduli Keamanan Keselamatan Dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut Sebagai Bagian Sistem Hankam	100	Orang	1.000.000.000	APBN	Papua Selatan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
B	BIDANG PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA						
B1	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH DARAT						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
1.	Penanganan Wilayah Perbatasan Darat RI-PNG STATIS (Papua dan Papua Selatan)	7	Kegiatan	1.132.558.000	APBN	LINTAS PROVINSI	TNI AD
2.	Bantuan Kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan (PPWP) di daerah perbatasan Napan Kab. TTU	1	Kegiatan	268.471.000	APBN	Timor Tengah Utara	Kementerian Pertahanan
3.	Penanganan Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL	2	Kegiatan	178.128.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	TNI AD
4.	Perkerasan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang)	104	Km	190.000.000.000	APBN	Kalimantan Barat	Kementerian Pertahanan
5.	Penanganan wilayah Perbatasan Darat RI-Malaysia	2	Kegiatan	153.588.000	APBN	Kalimantan Barat	TNI AD
6.	Perkerasan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (Kec. Lumbis Ogong dan Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan)	62.5	Km	110.000.000.000	APBN	Kalimantan Utara	Kementerian Pertahanan
7.	Penanganan wilayah Perbatasan Darat RI-Malaysia	2	Kegiatan	174.429.000	APBN	Kalimantan Utara	TNI AD
8.	Pembangunan Marshalling Area	1	Unit	117.252.124	APBN	Papua	Mabes TNI

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Kodam XVII/Cen						
9.	Identifikasi Patok/Pilar dan Sarpras Batas Negara Wilayah Darat	1	Kegiatan	3.450.000	APBN	Boven Digoel	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
10.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara	50	Orang	2.430.000	APBN	Merauke	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11.	Pembangunan Pos Wilayah Kodam XVII/Cen	7	Unit	333.570.468	APBN	Papua Pegunungan	Mabes TNI
B2	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT						
1.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Enggano Kab. Bengkulu Utara	0.15	Km	20.000.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Pekerjaan Umum
2.	Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Kep. Mentawai	0.075	Km	12.000.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Pekerjaan Umum
3.	Operasi Pam Ambalat	1	Operasi	48.715.637.500	APBN	Pusat	TNI
4.	Operasi Pamtas Laut Natuna Utara (LNU)	1	Operasi	46.123.225.000	APBN	Pusat	TNI
5.	Operasi Pamtas Laut RI-Thailand	1	Operasi	685.800.000	APBN	Pusat	TNI
6.	Operasi Pamtas Laut RI-Singapura	1	Operasi	342.900.000	APBN	Pusat	TNI
7.	Operasi Pamtas Laut RI-RDTL -	1	Operasi	1.676.400.000	APBN	Pusat	TNI

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Australia						
8.	Operasi Pamtas Laut RI-Australia	1	Operasi	914.400.000	APBN	Pusat	TNI
9.	Patkor MSSP (*Malacca Straits Sea Patrol*)	1	Operasi	914.400.000	APBN	Pusat	TNI
10.	Patkor Optima Malindo	1	Operasi	388.620.000	APBN	Pusat	TNI
11.	Patkor Malindo	1	Operasi	342.900.000	APBN	Pusat	TNI
12.	Patkor Indindo	1	Operasi	457.200.000	APBN	Pusat	TNI
13.	Patkor Indosin	1	Operasi	2.743.200.000	APBN	Pusat	TNI
14.	Patkor Philindo	1	Operasi	259.080.000	APBN	Pusat	TNI
15.	Patkor Ausindo	1	Operasi	457.200.000	APBN	Pusat	TNI
16.	*Trilateral Maritime Patrol (TMP) Indomalphi*	1	Operasi	777.240.000	APBN	Pusat	TNI
17.	*Trilateral Air Patrol (TAP) Indomalphi*	1	Operasi	411.480.000	APBN	Pusat	TNI
18.	*Eyes In The Sky (EIS) Malsindothai*	1	Operasi	3.004.718.400	APBN	Pusat	TNI
19.	Operasi Kamla	1	Operasi	9.453.040.000	APBN	Pusat	TNI
20.	Operasi Pam ALKI	1	Operasi	13.811.250.000	APBN	Pusat	TNI
21.	Patroli Laut Terkoordinasi	0	Operasi	0	APBN	Pusat	Badan Keamanan Laut
22.	Patroli Bersama	0	Operasi	0	APBN	Pusat	Badan Keamanan Laut

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
23.	Patroli Mandiri	0	Operasi	0	APBN	Pusat	Badan Keamanan Laut
24.	Patroli Udara Maritim	0	Operasi	0	APBN	Pusat	Badan Keamanan Laut
25.	Patroli Mandiri Operasi	10400	Jam Operasi	185.624.525.200	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
26.	Verifikasi Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR)	0	Unit	0	APBN	Lintas Provinsi	Badan Informasi Geospasial
27.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Rangsang di Desa Kedabu Rapat di Kec. Rangsang Pesisir di Kab. Kep. Meranti	0.29	Km	12.000.000.000	APBN	Kepulauan Meranti	Kementerian Pekerjaan Umum
28.	Pembangunan Flat Type 45 (1 Tower) dan Sarpras lanal Bali	1	Kegiatan	30.316.000.000	SBSN	Bali	TNI AL
29.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kep. Riau	0.1	Km	89.700.000.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Pekerjaan Umum
30.	Rencana Pembuatan Dan Pemutakhiran Peta Laut Natuna Segmen 6,7,8,9,10 (RI-Vietnam)	1	Kegiatan	1.298.840.000	RM	Natuna	TNI AL
31.	Rencana Pembuatan Dan Pemutakhiran Peta Laut Pulau Sentut (RI-Malaysia)	1	Kegiatan	1.154.635.000	RM	Kepulauan Riau	TNI AL
32.	Pembangunan Rumneg T70/10	1	Kegiatan	10.010.000.000	SBSN	Kepulauan	TNI AL

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Unit dan Sarpras Koarmada I					Riau	
33.	Pembangunan Rumneg T70/10 Unit dan Sarpras Lanudal Tj. Pinang	1	Kegiatan	9.800.000.000	SBSN	Kepulauan Riau	TNI AL
34.	Pembangunan Pengaman Pantai Padaidi (lanjutan) Pulau Sebatik Kab. Nunukan	0.45	Km	44.000.000.000	APBN	Nunukan	Kementerian Pekerjaan Umum
35.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas	0.18	Km	24.061.528.000	APBN	Sulawesi Utara	Kementerian Pekerjaan Umum
36.	Pembangunan Pengaman Pantai Tahuna Kab. Kep. Sangihe	0.28	Km	20.061.527.000	APBN	Sulawesi Utara	Kementerian Pekerjaan Umum
37.	Rencana Pembuatan Dan Pemutakhiran Peta Laut Pulau Lirang (RI-TimorLeste)	1	Kegiatan	1.157.192.000	RM	Maluku	TNI AL
B3	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH UDARA						
1.	Operasi Hanud	1	Operasi	25.031.700.000	APBN	Pusat	TNI
2.	Operasi Pengamatan/Pengintaian Udara	1	Operasi	5.248.656.000	APBN	Pusat	TNI
3.	Operasi Patroli Udara	1	Operasi	3.499.104.000	APBN	Pusat	TNI
4.	SATRAD 101 (PENGGATIAN RADAR)	0	Unit	0	APLN	Sabang	TNI AU
5.	Satrad 104 (Penggantian Radar)	0	Unit	0	APLN	Kota Dumai	TNI AU
6.	Satrad 201 (Penggantian Radar)	0	Unit	0	APLN	Natuna	TNI AU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
7.	Satrad 309 (Radar Baru)	0	Unit	0	APLN	Kupang	TNI AU
8.	Satrad 407 (Radar Baru)	0	Unit	0	APLN	Nusa Tenggara Timur	TNI AU
9.	Satrad 204 (Penggantian Radar)	0	Unit	0	APLN	Kalimantan Utara	TNI AU
10.	Satrad 306 (Radar Baru)	0	Unit	0	APLN	Pulau Morotai	TNI AU
11.	Satrad 304 (Radar Baru)	0	Unit	0	APLN	Kota Jayapura	TNI AU
II	PENGELOLAAN AKTIFITAS LINTAS BATAS NEGARA						
A	BIDANG MANAJEMEN LINTAS BATAS NEGARA						
A1	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN POS LINTAS BATAS NEGARA						
1.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Tanjung Pinang	27	Laporan	570.353.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Keuangan
2.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Atambua	4	Laporan	79.372.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Keuangan
3.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Kupang	12	Laporan	239.594.000	APBN	Amfoang Timur	Kementerian Keuangan
4.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi Kelas	1	Paket	0	APBN	Nusa Tenggara	Kementerian Imigrasi dan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	II Atambua					Timur	Pemasyarakatan
5.	Layanan Pengendalian dan Survei Penyakit (BKK Kelas I Kupang)	1	Paket	1.283.187.167	APBN	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Kesehatan
6.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Karantina Hewan	1	Paket	299.197.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Karantina Indonesia
7.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Karantina Ikan	1	Paket	185.111.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Karantina Indonesia
8.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Karantina Tumbuhan	1	Paket	119.613.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Karantina Indonesia
9.	Koordinasi Terkait Biosecurity Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	1	Paket	104.250.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Karantina Indonesia
10.	Pengawasan Karantina di PLBN	1	Paket	15.270.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Karantina Indonesia
11.	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	1	Paket	130.731.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Karantina Indonesia
12.	Layanan Pengendalian dan Survei Penyakit (LKK Entikong)	1	Paket	56.513.000	APBN	Kalimantan Barat	Kementerian Kesehatan
13.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Entikong	15	Laporan	308.912.000	APBN	Entikong	Kementerian Keuangan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
14.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Jagoi Babang	14	Laporan	298.446.000	APBN	Jagoi Babang	Kementerian Keuangan
15.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Nanga Badau	9	Laporan	183.661.000	APBN	Badau	Kementerian Keuangan
16.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Sintete	10	Laporan	214.420.000	APBN	Sambas	Kementerian Keuangan
17.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau	1	Paket	0	APBN	Entikong	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
18.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi Kelas II Sambas	1	Paket	0	APBN	Aruk	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
19.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau	1	Paket	0	APBN	Badau	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
20.	Tindakan Karantina Hewan	1	Paket	904.465.000	APBN	Kalimantan Barat	Badan Karantina Indonesia
21.	Tindakan Karantina Ikan	1	Paket	485.599.000	APBN	Kalimantan Barat	Badan Karantina Indonesia
22.	Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	1	Paket	243.360.000	APBN	Kalimantan Barat	Badan Karantina Indonesia
23.	Kegiatan Dukungan Tindakan Karantina dan Koordinasi	1	Paket	444.274.000	APBN	Kalimantan	Badan Karantina

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan					Barat	Indonesia
24.	Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum	1	Paket	49.258.000	APBN	Kalimantan Barat	Badan Karantina Indonesia
25.	Patroli Bersama / Operasi Kepatuhan	1	Paket	76.704.000	APBN	Kalimantan Barat	Badan Karantina Indonesia
26.	Layanan Pengendalian dan Survei Penyakit (BKK Kelas I Tarakan)	1	Paket	35.931.750	APBN	Kalimantan Utara	Kementerian Kesehatan
27.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Nunukan	5	Laporan	86.989.000	APBN	Nunukan	Kementerian Keuangan
28.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Tarakan	12	Laporan	253.200.000	APBN	Kalimantan Utara	Kementerian Keuangan
29.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi kelas II Nunukan	1	Paket	0	APBN	Nunukan	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
30.	Sertifikasi Kesehatan Karantina Hewan	1	Paket	274.807.000	APBN	Nunukan	Badan Karantina Indonesia
31.	Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan	1	Paket	315.805.000	APBN	Nunukan	Badan Karantina Indonesia
32.	Sertifikasi Kesehatan Karantina Tumbuhan	1	Paket	274.170.000	APBN	Nunukan	Badan Karantina Indonesia
33.	Koordinasi Terkait Biosecurity	1	Paket	208.372.000	APBN	Nunukan	Badan Karantina

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan						Indonesia
34.	Koordinasi dan Kerjasama Perkarantinaan di PLBN	1	Paket	254.968.000	APBN	Nunukan	Badan Karantina Indonesia
35.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna	1	Paket	0	APBN	Kepulauan Sangihe	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
36.	Layanan Pengendalian dan Survei Penyakit (BKK Kelas I Jayapura)	1	Paket	70.573.000	APBN	Kota Jayapura	Kementerian Kesehatan
37.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Jayapura	8	Laporan	165.067.000	APBN	Skow	Kementerian Keuangan
38.	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilker Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura	1	Paket	0	APBN	Skow	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
39.	Tindakan Karantina Hewan	1	Paket	534.317.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
40.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Karantina Ikan	1	Paket	287.097.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
41.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Karantina Hewan	1	Paket	330.965.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
42.	Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	1	Paket	51.593.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
43.	Patroli Bersama AL/ AD/AU/KEPOLISIAN	1	Paket	37.240.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
44.	Undangan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait	1	Paket	23.000.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
45.	Rapat Koordinasi Kewasdakan dan Evaluasi Kewasdakan	1	Paket	46.620.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
46.	Pendampingan Operasional Wilayah Perbatasan	1	Paket	12.382.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
47.	Koordinasi Berbasis Zona Rawan/Kegiatan Intelijen Terbatas	1	Paket	35.040.000	APBN	Skow	Badan Karantina Indonesia
48.	Layanan Pengendalian dan Survei Penyakit (BKK Kelas II Merauke)	1	Paket	35.543.000	APBN	Papua Selatan	Kementerian Kesehatan
49.	Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai di KPPBC Merauke	9	Laporan	184.986.000	APBN	Papua Selatan	Kementerian Keuangan
50.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Karantina Hewan	1	Paket	499.149.000	APBN	Papua Selatan	Badan Karantina Indonesia
51.	Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	1	Paket	223.630.000	APBN	Papua Selatan	Badan Karantina Indonesia
52.	Patroli Bersama TNI/Polisi	1	Paket	193.780.000	APBN	Papua Selatan	Badan Karantina Indonesia
53.	Dukungan Penyelenggaraan	1	Paket	696.227.000	APBN	Papua Selatan	Badan Karantina

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Tugas dan Fungsi Unit Karantina Tumbuhan						Indonesia
B	BIDANG KERJASAMA LINTAS BATAS NEGARA						
B1	SUB BIDANG STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA SOSIAL EKONOMI LINTAS BATAS NEGARA						
1.	*BTNCLO Training*	1	Kegiatan	460.775.000	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.	Pengembangan Aplikasi "Imbas Cepat"	1	Kegiatan	185.494.000	APBN	Pusat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	*BTNCLO Technical Support* 3 Wilayah	3	Kegiatan	212.794.000	APBN	Lintas Provinsi	Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba	3	Lokasi	144.196.000	APBN	Lintas Provinsi	Badan Narkotika Nasional
5.	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Bersih Narkoba	3	Lembaga	144.000.000	APBN	Lintas Provinsi	Badan Narkotika Nasional
6.	Fasilitasi Pemberdayaan Instansi/Tempat Kerja Bersih Narkoba	3	Lembaga	144.000.000	APBN	Lintas Provinsi	Badan Narkotika Nasional

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
7.	Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3	Kelompok Masyarakat	144.000.000	APBN	Lintas Provinsi	Badan Narkotika Nasional
8.	Layanan Pemerdayaan Sosial dan Ekonomi PMI dan Keluarganya di BP3MI	0	Orang	0	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
9.	Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah di BP3MI	1300	Orang	71.483.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
10.	Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi PMI di BP3MI	318	Orang	982.194.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
11.	Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi	1	Kegiatan	448.235.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
12.	Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah di BP3MI	2500	Orang	126.663.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
13.	Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi PMI di BP3MI	131	Orang	336.411.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
14.	Layanan Pemerdayaan Sosial dan Ekonomi PMI dan Keluarganya di BP3MI	20	Orang	48.968.000	APBN	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
15.	Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah di BP3MI	610	Orang	40.228.000	APBN	Kalimantan Barat	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
16.	Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi PMI di BP3MI	968	Orang	1.317.022.000	APBN	Kalimantan Barat	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
17.	Layanan Pemerdayaan Sosial dan EkonomiPMI dan Keluarganya di BP3MI	20	Orang	59.998.000	APBN	Kalimantan Barat	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
18.	Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah di BP3MI	1000	Orang	71.458.000	APBN	Kalimantan Utara	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
19.	Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi PMI di BP3MI	840	Orang	936.441.000	APBN	Kalimantan Utara	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
20.	Layanan Pemerdayaan Sosial dan Ekonomi PMI dan Keluarganya di BP3MI	0	Orang	0	APBN	Kalimantan Utara	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
							Indonesia
21.	Sub *Regional Border Transnational Crime Liaison Partnership Forum*	1	Kegiatan	199.445.000	APBN	Sulawesi Utara	Kepolisian Negara Republik Indonesia
III	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA						
A	BIDANG PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN						
A1	SUB BIDANG PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN						
1.	Penyusunan Rencana Zonasi Rincian Pengembangan Kawasan Sabang	1	Dokumen	1.000.000.000	APBN	Kota Sabang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PKSN Jasa/Sei Kelik	1	Dokumen	2.288.713.340	APBN	Sintang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
3.	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PKSN Long Midang	1	Dokumen	2.288.713.340	APBN	Long Midang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
4.	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Karatung	1	Dokumen	2.288.713.340	APBN	Kepulauan Talaud	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
5.	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Marampit	1	Dokumen	2.288.713.300	APBN	Kepulauan Talaud	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
6.	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN, (P.Bongkil)	1	Dokumen	1.231.250.000	APBN	Bolaang Mongondow	Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PKSN Tolitoli	1	Dokumen	2.288.713.340	APBN	Toli-Toli	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
8.	Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PKSN Kwandang	1	Dokumen	2.288.713.340	APBN	Gorontalo Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
9.	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN (Pulau Yiew Besar)	1	Rekomendasi kebijakan	1.231.250.000	APBN	Halmahera Tengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
A2	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						
1.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB Prioritas Nasional (Aceh, Kalbar, Jatim, NTB, Gorontalo, Papua Maluku)	270	Orang	1.645.201.000	APBN	Pusat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2.	Simulasi Penanggulangan Bencana Prioritas Nasional	0	Orang	3.089.262.000	APBN	Pusat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3.	Pendampingan Perencanaan Penanggulangan Bencana	7	Paket	1.500.000.000	APBN	Pusat	Badan Nasional Penanggulangan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Daerah						Bencana
4.	NSPK Mitigasi Bencana	3	Dokumen	849.000.000	APBN	Pusat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur)	12	Lokasi	9.030.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
6.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Kalbar, Sulut, Riau, Papua)	0.07	Persen	17.638.219.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
7.	Pengelolaan Sampah (Kalbar, Sulut, NTT, Riau, Papua)	21.8	Juta Ton	30.551.408.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
8.	Pengelolaan Sampah (Kalbar, Sulut, NTT, Riau, Papua)	5.31	Juta Ton	789.043.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
9.	Pengelolaan Sampah (Kalbar, Sulut, NTT, Riau, Papua)	1000	Ton	11.024.018	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
10.	Pengelolaan Sampah (Kalbar, Sulut, NTT, Riau, Papua)	17	Persen	10.866.412.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
11.	Adaptasi perubahan iklim (Kalbar, Sulut, NTT)	20	Lokasi	29.660.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
12.	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Pengendalian Perubahan Iklim (Kalbar, Riau)	26	Desa	2.834.808.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
13.	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat Pengendalian Perubahan iklim(Kalbar, Riau)	6	Lokasi	3.000.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Lingkungan Hidup
14.	Pengendalian Perhutanan Sosial	100	Orang	0	APBN	Pusat	Kementerian Kehutanan
15.	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	1460	Lembaga	2.286.000.000	APBN	Bengkalis	Kementerian Lingkungan Hidup
16.	Mitigasi Perubahan Iklim	2	Dokumen	5.509.000.000	APBN	Alor	Kementerian Lingkungan Hidup
17.	Mobilisasi Sumber Daya	60	Kelompok	4.000.000.000	APBN	Alor	Kementerian Lingkungan Hidup
18.	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1	Kelompok Masyarakat	0	APBN	Malinau	Kementerian Kehutanan
C	BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN						
C1	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	PKSN						
1.	Pelatihan Vokasi Provinsi Aceh pada BLK Maritim Kota Sabang	4	Paket	261.776.000	APBN	Sabang	Kementerian Ketenagakerjaan
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Berkelanjutan	1	Kegiatan	50.000.000	APBN	Sabang	Kementerian Pariwisata
3.	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Aceh Besar	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
4.	Pembiayaan bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Aceh Besar	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
5.	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	200	Orang	79.804.000	APBN	Aceh Besar	Kementerian Pertanian
6.	Kawasan Kelapa	400	Ha	1.131.670.000	APBN	Aceh Besar	Kementerian Pertanian
7.	Bantuan Ternak Ruminansia Potong	340	Ekor	1.360.000.000	APBN	Aceh Besar	Kementerian Pertanian
8.	Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Agromaritim	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Sumatera Utara	Kementerian Koperasi
9.	Pendampingan Kemitraan Usaha Koperasi	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Sumatera Utara	Kementerian Koperasi
10.	Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Agromaritim	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Sumatera Utara	Kementerian Koperasi
11.	Fasilitasi Jaringan Usaha	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Sumatera	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Koperasi Sektor Agromaritim					Utara	Koperasi
12.	Cetak Sawah	600	Ha	21.630.000.000	APBN	Serdang Bedagai	Kementerian Pertanian
13.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir Kec. Bantan	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Bengkalis	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	200	Orang	80.804.000	APBN	Kepulauan Meranti	Kementerian Pertanian
15.	Kawasan Kelapa	5000	Ha	12.667.430.000	APBN	Kepulauan Meranti	Kementerian Pertanian
16.	Kawasan Kelapa	850	Ha	2.189.910.000	APBN	Rokan Hilir	Kementerian Pertanian
17.	Kawasan Sagu	150	Ha	790.240.000	APBN	Kepulauan Meranti	Kementerian Pertanian
18.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara Kec. Bunguran Selatan	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Ranai	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19.	Pelatihan Vokasi Provinsi Kepulauan Riau pada UPTD BLK Natuna	7	Paket	261.776.000	APBN	Ranai	Kementerian Ketenagakerjaan
20.	Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Koperasi
21.	Pendampingan Kemitraan	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Kepulauan	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Usaha Koperasi					Riau	Koperasi
22.	Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Agromaritim	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Koperasi
23.	Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi Sektor Agromaritim	1	Koperasi	50.000.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Koperasi
24.	Fasilitasi Dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Kota Batam	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
25.	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Natuna	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
26.	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
27.	Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Kota Batam	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
28.	Pembiayaan bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Natuna	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
29.	Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
30.	Kawasan Kelapa	200	Ha	591.780.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
31.	Kawasan Kelapa	300	Ha	882.730.000	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian
32.	Kawasan Kelapa	200	Ha	597.730.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian
33.	Kawasan Kelapa	300	Ha	882.730.000	APBN	Natuna	Kementerian Pertanian
34.	Pemeliharaan kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	1	Unit	25.225.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian
35.	Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	5	Unit	69.105.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian
36.	Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	1	Unit	17.713.000	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian
37.	Fasilitasi Dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Sumba Timur	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
38.	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Sumba Barat Daya	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
39.	Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Sumba Timur	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
40.	Pembiayaan bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Sumba Barat Daya	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
41.	Peningkatan Kapasitas	60	Orang	341.382.000	APBN	Sabu Raijua	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Masyarakat melalui Vokasi Pengembangan Rumput Laut di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal						Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
42.	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan	40	Orang	206.834.000	APBN	Sabu Raijua	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
43.	Vokasi Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon	40	Orang	274.249.000	APBN	Sumba Barat Daya	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
44.	Kawasan jambu Mete	1000	Ha	3.900.000.000	APBN	Timor Tengah Utara	Kementerian Pertanian
45.	Kawasan Jambu Mete	200	Ha	828.000.000	APBN	Sabu Raijua	Kementerian Pertanian
46.	Kawasan Jambu Mete	300	Ha	1.212.000.000	APBN	Rote Ndao	Kementerian Pertanian
47.	Kawasan Jambu Mete	200	Ha	908.000.000	APBN	Malaka	Kementerian Pertanian
48.	Kawasan Jambu Mete	100	Ha	444.000.000	APBN	Belu	Kementerian Pertanian
49.	Kawasan jambu Mete	3000	Ha	11.720.000.000	APBN	Alor	Kementerian Pertanian
50.	Kawasan Kakao	70	Ha	382.900.000	APBN	Malaka	Kementerian Pertanian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
51.	Penguatan Kompetensi SDM KDKMP melalui Pendidikan dan Pelatihan	67	Orang	700.000.000	APBN	Entikong	Kementerian Koperasi
52.	Penguatan kompetensi SDM KDKMP melalui pendidikan dan pelatihan	67	Orang	700.000.000	APBN	Jagoi Babang	Kementerian Koperasi
53.	Kawasan Kelapa	500	Ha	1.507.890.000	APBN	Bengkayang	Kementerian Pertanian
54.	Kawasan Kelapa	600	Ha	1.818.180.000	APBN	Sambas	Kementerian Pertanian
55.	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan	600	Orang	323.025.000	APBN	Sambas	Kementerian Pertanian
56.	Regu Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT)	2	Kelompok Masyarakat	153.200.000	APBN	Sambas	Kementerian Pertanian
57.	Pelatihan Vokasi Provinsi Kalimantan Utara pada BLK Nunukan	5	Paket	327.220.000	APBN	Nunukan	Kementerian Ketenagakerjaan
58.	Penguatan Kompetensi SDM KDKMP melalui pendidikan dan pelatihan	67	Orang	700.000.000	APBN	Malinau	Kementerian Koperasi
59.	Penguatan kompetensi SDM KDKMP Melalui pendidikan dan pelatihan	67	Orang	700.000.000	APBN	Nunukan	Kementerian Koperasi
60.	Fasilitasi Dan Pembinaan Usaha	243	UMKM	298.078.000	DAK Non	Minahasa	Kementerian Usaha, Kecil, dan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Mikro melalui PLUT-UMKM				Fisik	Selatan	Menengah
61.	Pembiayaan bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Minahasa Selatan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
62.	Benih Sumber Tanaman Perkebunan	150000	Unit	3.858.226.000	APBN	Minahasa Utara	Kementerian Pertanian
63.	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	4	Unit	379.484.000	APBN	Minahasa Utara	Kementerian Pertanian
64.	Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	4	Unit	48.657.000	APBN	Minahasa Utara	Kementerian Pertanian
65.	Kawasan Kakao	950	Ha	4.902.500.000	APBN	Bolaang Mongondow Utara	Kementerian Pertanian
66.	Kawasan Kopi	50	Ha	310.500.000	APBN	Bolaang Mongondow Utara	Kementerian Pertanian
67.	Kawasan Pala	250	Ha	706.875.000	APBN	Kepulauan Talaud	Kementerian Pertanian
68.	Kawasan Pala	300	Ha	842.950.000	APBN	Kepulauan Sangihe	Kementerian Pertanian
69.	Kawasan Pala	250	Ha	532.500.000	APBN	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Pertanian
70.	Kawasan Pala	400	Ha	1.267.300.000	APBN	Minahasa	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
						Utara	Pertanian
71.	Kawasan Pala	300	Ha	917.850.000	APBN	Bolaang Mongondow Utara	Kementerian Pertanian
72.	Kawasan Sagu	200	Ha	442.620.000	APBN	Kepulauan Sangihe	Kementerian Pertanian
73.	Kawasan Kelapa	1100	Ha	6.666.350.000	APBN	Minahasa Utara	Kementerian Pertanian
74.	Kawasan Kelapa	800	Ha	4.735.550.000	APBN	Kepulauan Talaud	Kementerian Pertanian
75.	Kawasan Kelapa	1500	Ha	4.542.030.000	APBN	Kepulauan Sangihe	Kementerian Pertanian
76.	Kawasan Kelapa	1800	Ha	3.350.440.000	APBN	Bolaang Mongondow Utara	Kementerian Pertanian
77.	Pendampingan Revitalisasi Koperasi	2	Koperasi	250.000.000	APBN	Toli-Toli	Kementerian Koperasi
78.	Kawasan Kakao	900	Ha	4.004.000.000	APBN	Toli-Toli	Kementerian Pertanian
79.	Kawasan Pala	100	Ha	261.300.000	APBN	Toli-Toli	Kementerian Pertanian
80.	Kawasan Kelapa	800	Ha	4.557.170.000	APBN	Toli-Toli	Kementerian Pertanian
81.	Terciptanya SDM yang mampu memproduksi VCO melalui	10	Paket	200.000.000	APBN	Kei Besar	Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	program wirausaha baru Industri						
82.	Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	5	Unit	64.215.000	APBN	Maluku Tenggara	Kementerian Pertanian
83.	Kawasan Jambu Mete	200	Ha	920.000.000	APBN	Maluku Tenggara	Kementerian Pertanian
84.	Kawasan Jambu Mete	1100	Ha	4.870.000.000	APBN	Maluku Barat Daya	Kementerian Pertanian
85.	Kawasan Kelapa	300	Ha	1.453.910.000	APBN	Maluku Tenggara	Kementerian Pertanian
86.	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Daruba	Kementerian Pariwisata
87.	Morotai Festival	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Daruba	Kementerian Pariwisata
88.	Cetak Sawah	100	Ha	3.605.000.000	APBN	Pulau Morotai	Kementerian Pertanian
89.	Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	15	Unit	144.510.000	APBN	Pulau Morotai	Kementerian Pertanian
90.	Kawasan kakao	400	Ha	2.101.500.000	APBN	Pulau Morotai	Kementerian Pertanian
91.	Kawasan Pala	300	Ha	913.700.000	APBN	Pulau Morotai	Kementerian Pertanian
92.	Kawasan Pala	300	Ha	913.700.000	APBN	Halmahera Tengah	Kementerian Pertanian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
93.	Kawasan Kelapa	1150	Ha	1.443.020.000	APBN	Pulau Morotai	Kementerian Pertanian
94.	Pelatihan Vokasi Provinsi Papua pada LLK UKM Biak	5	Paket	261.776.000	APBN	Biak Numfor	Kementerian Ketenagakerjaan
95.	Biak Munara Wampasi	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Biak Numfor	Kementerian Pariwisata
96.	Fasilitasi Dan Pembinaan Usaha Mikro melalui PLUT-UMKM	243	UMKM	298.078.000	DAK Non Fisik	Biak Numfor	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
97.	Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	1250	UMKM	407.862.750	DAK Non Fisik	Biak Numfor	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah
98.	Bantuan Ternak Ruminansia Potong	240	Ekor	960.000.000	APBN	Kota Jayapura	Kementerian Pertanian
99.	Kawasan Kakao	100	Ha	802.000.000	APBN	Sarmi	Kementerian Pertanian
100.	Kawasan Kakao	1250	Ha	9.607.000.000	APBN	Keerom	Kementerian Pertanian
101.	Kawasan Sagu	200	Ha	765.020.000	APBN	Biak Numfor	Kementerian Pertanian
102.	Kawasan Kelapa	1500	Ha	2.566.520.000	APBN	Biak Numfor	Kementerian Pertanian
103.	Penguatan Kompetensi SDM KDKMP melalui pendidikan dan pelatihan	67	Orang	700.000.000	APBN	Boven Digoel	Kementerian Koperasi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
104.	Festival Kali Maro Pantai Arafura	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Merauke	Kementerian Pariwisata
105.	Cetak Sawah	20670	Ha	745.153.500.000	APBN	Merauke	Kementerian Pertanian
106.	Jalan Usaha Tani	5	Unit	563.868.000	APBN	Merauke	Kementerian Pertanian
107.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	2000	Unit	30.181.030.000	APBN	Merauke	Kementerian Pertanian
108.	Kawasan Kelapa	300	Ha	1.288.390.000	APBN	Merauke	Kementerian Pertanian
109.	Cetak Sawah	800	Ha	28.840.000.000	APBN	Mimika	Kementerian Pertanian
110.	Kawasan Sagu	200	Ha	765.020.000	APBN	Mimika	Kementerian Pertanian
111.	Kawasan Kopi	200	Ha	1.559.500.000	APBN	Pegunungan Bintang	Kementerian Pertanian
112.	Kawasan Kelapa	1100	Ha	1.288.390.000	APBN	Raja Ampat	Kementerian Pertanian
C3	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PKSN						
1.	Rehabilitasi dan Renovasi MIN Anoi Itam	1	Unit	1.345.139.280	APBN	Sukajaya	Kementerian Pekerjaan Umum
2.	Rehabilitasi dan Renovasi RA Al	1	Unit	3.391.172.920	APBN	Sukakarya	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Quran						Pekerjaan Umum
3.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Darul Hijrah	1	Unit	2.174.980.000	APBN	Sukakarya	Kementerian Pekerjaan Umum
4.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al Falah	1	Unit	1.696.706.004	APBN	Rupat	Kementerian Pekerjaan Umum
5.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Fakhrul Islam	1	Unit	1.829.224.924	APBN	Rupat	Kementerian Pekerjaan Umum
6.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Anshor	1	Unit	1.960.846.567	APBN	Rupat	Kementerian Pekerjaan Umum
7.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Annahdhatud Diniyah	1	Unit	2.496.049.951	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
8.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Nurul Jadid Pedekik	1	Unit	2.893.327.827	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
9.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Tajhiz Diniyah	1	Unit	5.035.930.138	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
10.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Ar-Rosyidiyah	1	Unit	3.718.871.897	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
11.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Huda Bengkalis	1	Unit	3.775.825.372	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
12.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Ar Rosyidiyah	1	Unit	2.185.502.708	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Darussalam	1	Unit	3.533.027.880	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
14.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS	1	Unit	3.230.722.966	APBN	Bantan	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Nurul Hidayah Bantan Tua						Pekerjaan Umum
15.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Miftahul Jannah Selat Baru	1	Unit	3.158.090.735	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
16.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Darul Aiman Muntai	1	Unit	800.949.840	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
17.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al Irsyadiyah Muntai	1	Unit	2.949.125.335	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
18.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Darul Aiman Muntai	1	Unit	2.012.680.304	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
19.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Miftahul Ulum Bantan Air	1	Unit	3.261.750.638	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
20.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Darul Aiman Muntai	1	Unit	2.044.559.084	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
21.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Falah Jangkang	1	Unit	2.162.996.937	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
22.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSN 5 Bengkalis	1	Unit	2.899.374.332	APBN	Rupat	Kementerian Pekerjaan Umum
23.	Rehabilitasi dan Renovasi MIN 1 Bengkalis	1	Unit	4.137.291.281	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
24.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSN 2 Bengkalis	1	Unit	5.009.666.518	APBN	Bantan	Kementerian Pekerjaan Umum
25.	Rehabilitasi dan Renovasi MAN 1 Bengkalis	1	Unit	9.680.489.469	APBN	Bengkalis	Kementerian Pekerjaan Umum
26.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS	1	Unit	2.365.780.035	APBN	Serasan	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Ibnu Hajar						Pekerjaan Umum
27.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Hidayah	1	Unit	2.778.208.659	APBN	Pulau Tiga	Kementerian Pekerjaan Umum
28.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Arofah	1	Unit	2.545.033.802	APBN	Bunguran Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
29.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Madinatunnajah	1	Unit	1.310.899.751	APBN	Bunguran Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
30.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Ibnu Rusyd	1	Unit	2.211.866.568	APBN	Bunguran Timur Laut	Kementerian Pekerjaan Umum
31.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Nur Ichasan	1	Unit	1.501.107.906	APBN	Bunguran Utara	Kementerian Pekerjaan Umum
32.	Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Kabupaten Natuna	1	Unit	191.807.858.265	APBN	Bunguran Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
33.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Leosama	70	Unit	1.078.000.000	DAK	Kakuluk Mesak	Kementerian Pekerjaan Umum
34.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Darul Ulum Matang Danau	1	Unit	2.363.136.867	APBN	Paloh	Kementerian Pekerjaan Umum
35.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Istiqomah Entikong	1	Unit	3.690.027.000	APBN	Entikong	Kementerian Pekerjaan Umum
36.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSN 2 Sanggau	1	Unit	4.540.051.800	APBN	Sekayam	Kementerian Pekerjaan Umum
37.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Nahdatul Wathan	1	Unit	4.256.486.400	APBN	Putussibau Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
38.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Raudhatul Jannah	1	Unit	2.150.708.400	APBN	Putussibau Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
39.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Ma'arif NU Kapuas Hulu	1	Unit	2.486.820.000	APBN	Putussibau Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
40.	Rehabilitasi dan Renovasi MIN Kapuas Hulu	1	Unit	6.626.809.200	APBN	Putussibau Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
41.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSN 1 Kapuas Hulu	1	Unit	469.895.400	APBN	Putussibau Utara	Kementerian Pekerjaan Umum
42.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/ Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Kaliau'	100	SR	1.085.792.850	DAK	Sajingan Besar	Kementerian Pekerjaan Umum
43.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/ Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Lelingluan	216	SR	1.586.520.000	DAK	Tanimbar Utara	Kementerian Pekerjaan Umum
44.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/	117	SR	1.200.420.000	DAK	Tanimbar Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Olilit						
D	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN						
D2	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS						
1.	Fasilitasi Penerapan GISA Secara Inklusif	15	Lokasi	923.601.000	APBN	Pusat	Kementerian Dalam Negeri
2.	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	300	Orang	700.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Dalam Negeri
3.	Program Keluarga Harapan (PKH)	834822	KPM	1.851.796.350.000	APBN	Pusat	Kementerian Sosial
4.	Sembako	1355444	KPM	2.438.358.600.000	APBN	Pusat	Kementerian Sosial
5.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	10	KK	1.025.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Sosial
6.	Penyaluran Bantuan Pangan Beras	18	Lokasi	20.464.952.400	APBN	Pusat	Badan Pangan Nasional
7.	Aktivasi Penguatan/Pemajuan Kebudayaan	6	Lokasi	15.000.000.000	APBN	Pusat	Kementerian Kebudayaan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
8.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Ruyung	58	SR	696.000.000	DAK	Mesjid Raya	Kementerian Pekerjaan Umum
9.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Ladong	53	SR	636.000.000	DAK	Mesjid Raya	Kementerian Pekerjaan Umum
10.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR), Desa Pulo Pande	100	SR	500.000.000	DAK	Batee	Kementerian Pekerjaan Umum
11.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR), Desa Geunteng Timur	193	SR	772.000.000	DAK	Batee	Kementerian Pekerjaan Umum
12.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR), Desa Neuheun	446	SR	2.676.000.000	DAK	Batee	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	Uprating IPA/Pembangunan IPA	170	SR	749.173.000	DAK	Peureulak	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Krut Lintang					Timur	Pekerjaan Umum
14.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Geulanggang Merak	150	SR	911.550.000	DAK	Peureulak Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
15.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Seuneubok Dalam	107	SR	748.144.000	DAK	Peureulak Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
16.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan)	60	SR	390.720.000	DAK	Peureulak Timur	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Seuneubok Rawang						
17.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR), Desa Matang Seuleumak	68	SR	284.512.000	DAK	Nurussalam	Kementerian Pekerjaan Umum
18.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Bintang Hu	50	Unit	615.000.000	DAK	Batee	Kementerian Pekerjaan Umum
19.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Beusa Seberang	64	Unit	832.000.000	DAK	Peurelak Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
20.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Alue Bu Alue Nireh	50	Unit	650.000.000	DAK	Peureulak Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
21.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Seuneubok Peusangan	58	Unit	754.000.000	DAK	Peureulak	Kementerian Pekerjaan Umum
22.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Tanjung Minjei	50	Unit	650.000.000	DAK	Madat	Kementerian Pekerjaan Umum
23.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Cot Batee	50	Unit	271.500.000	DAK	Kuala	Kementerian Pekerjaan Umum
24.	Pelatihan Vokasi Provinsi Aceh pada UPTD BLK Aceh Timur	5	Paket	327.220.000	APBN	Aceh Timur	Kementerian Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
25.	Pelatihan Vokasi Provinsi Aceh pada UPTD BLK Kab. Bireuen	7	Paket	458.108.000	APBN	Bireuen	Kementerian Ketenagakerjaan
26.	Pelatihan Vokasi Provinsi Aceh pada BLKI Aceh Utara	7	Paket	458.108.000	APBN	Aceh Utara	Kementerian Ketenagakerjaan
27.	Pembangunan Sekolah Rakyat Kota Lhokseumawe	1	Unit	55.280.036.626	APBN	Muara Satu	Kementerian Pekerjaan Umum
28.	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan GMDSS dan AIS pada SROP Kelas IV Susoh dan SROP Kelas IV Sinabang pada Disnav Sabang	1	Paket	5.000.000.000	PNBP	Kota Sabang	Kementerian Perhubungan
29.	Pengadaan dan pemasangan GMDSS SROP Kelas III Lhokseumawe	1	Paket	18.416.496.000	PNBP	Aceh Utara	Kementerian Perhubungan
30.	MAN Insan Cendekia Aceh Timur	1	Unit	4.588.000.000	SBSN	Aceh Timur	Kementerian Agama
31.	MTSN 1 Pidie Jaya	1	Unit	3.562.307.000	SBSN	Pidie Jaya	Kementerian Agama
32.	Aktivasi Ruang Kreatif	40	Orang	136.000.000	APBN	Aceh	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
33.	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Kekayaan Intelektual	50	Orang	82.388.000	APBN	Aceh	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
34.	Penguatan Puskesmas-Pembangunan Puskesmas (Rusak Berat), Puskesmas Peudawa	1	Paket	8.871.904.000	DAK	Peudawa	Kementerian Kesehatan
35.	Rehabilitasi dan Renovasi RA Nurul Azmi	1	Unit	174.062.500	APBN	Sei Suka	Kementerian Pekerjaan Umum
36.	Rehabilitasi dan Renavasi MIS Muhammadiyah Simodong	1	Unit	636.372.500	APBN	Sei Suka	Kementerian Pekerjaan Umum
37.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Pancasila	1	Unit	475.399.500	APBN	Tanjung Beringin	Kementerian Pekerjaan Umum
38.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bagan Kuala Kec. Tanjung Beringin	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Serdang Bedagai	Kementerian Kelautan dan Perikanan
39.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Bala	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Asahan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
40.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kuala Gebang Kec. Geban	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Langkat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
41.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Batu Bara	Kementerian Kelautan dan Perikanan
42.	Pelatihan Vokasi Provinsi	4	Paket	261.776.000	APBN	Batu Bara	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Sumatera Utara pada UPTD Batubara						Ketenagakerjaan
43.	Pelatihan Vokasi Provinsi Sumatera Utara pada UPTD BLK Kab. Langkat	4	Paket	261.776.000	APBN	Langkat	Kementerian Ketenagakerjaan
44.	Rehabilitasi Gedung Kantor	1	Paket	1.000.000.000	PNBP	Langkat	Kementerian Perhubungan
45.	MTSN 4 Langkat	1	Unit	6.131.000.000	SBSN	Langkat	Kementerian Agama
46.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Raudhatut Thalibin	1	Unit	553.621.507	APBN	Rangsang Pesisir	Kementerian Pekerjaan Umum
47.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Tarbiyah Islamiyah	1	Unit	531.345.804	APBN	Rangsang Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
48.	Rehabiltiasi dan Renovasi MIS Raudhatut Thalibin	1	Unit	582.159.875	APBN	Rangsang Pesisir	Kementerian Pekerjaan Umum
49.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Raudhatul Hidayah	1	Unit	874.355.929	APBN	Rangsang	Kementerian Pekerjaan Umum
50.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Raudhatut Thalibin	1	Unit	677.743.988	APBN	Rangsang Pesisir	Kementerian Pekerjaan Umum
51.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS An-Nur	1	Unit	1.432.364.119	APBN	Rangsang Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
52.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Miftahul Mubtadin	1	Unit	1.098.059.800	APBN	Rangsang	Kementerian Pekerjaan Umum
53.	Rehabilitasi dan Renovasi MIN 1 Rokan Hilir	1	Unit	932.713.070	APBN	Bangko	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
54.	Rehabilitasi dan Renovasi MAN 2 Kepulauan Meranti	1	Unit	1.813.286.292	APBN	Rangsang Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
55.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Al-Qosimiyah	1	Unit	849.754.008	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
56.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Ishlahiyah	1	Unit	928.101.519	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
57.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Al-Falah	1	Unit	572.139.013	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
58.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Al-Husin	1	Unit	895.004.451	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
59.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Al-Washliyah	1	Unit	997.267.311	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
60.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Datuk Batu Hampar	1	Unit	978.943.262	APBN	Bangko	Kementerian Pekerjaan Umum
61.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Ishlahiyah	1	Unit	773.268.768	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
62.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Adalah	1	Unit	1.121.954.706	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
63.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Islahiyah Panipahan	1	Unit	825.982.505	APBN	Pasir Limau Kapas	Kementerian Pekerjaan Umum
64.	Festival Bakar Tongkang	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Rokan Hilir	Kementerian Pariwisata
65.	Festival Perang Air	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Kepulauan Meranti	Kementerian Pariwisata

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
66.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Darul Ikhwan Nw	1	Unit	922.962.698	APBN	Belakang Padang	Kementerian Pekerjaan Umum
67.	Rehabilitasi dan Renovasi MAS Amanatul Ummah	1	Unit	741.799.878	APBN	Belakang Padang	Kementerian Pekerjaan Umum
68.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Nurul Iman	1	Unit	724.138.220	APBN	Belakang Padang	Kementerian Pekerjaan Umum
69.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Darul Jannah	1	Unit	707.693.046	APBN	Karimun	Kementerian Pekerjaan Umum
70.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Islamiyah Yaspika	1	Unit	1.031.444.716	APBN	Karimun	Kementerian Pekerjaan Umum
71.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Ar-Raudhah	1	Unit	978.160.244	APBN	Tebing	Kementerian Pekerjaan Umum
72.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Al-Marif	1	Unit	1.209.283.317	APBN	Jemaja	Kementerian Pekerjaan Umum
73.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara	1	Unit	1.500.000.000	APBN	Karimun	Kementerian Dalam Negeri
74.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara	1	Unit	1.500.000.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Dalam Negeri
75.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Belakang Padang	1	Paket	4.864.488.534	APLN	Belakang Padang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
76.	Pengembangan Bandar Udara	1	Paket	5.500.000.000	PNBP	Karimun	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Raja Haji Abdulah Karimun Kepulauan Riau						Perhubungan
77.	Layanan Angkutan Barang Perintis Pelabuhan Lampa-Ranai	1	Layanan	7.660.829.000	RM	Natuna	Kementerian Perhubungan
78.	MAN Insan Cendekia Kota Batam	1	Unit	2.275.703.000	SBSN	Kota Batam	Kementerian Agama
79.	MIN 2 Karimun	1	Unit	4.409.000.000	SBSN	Karimun	Kementerian Agama
80.	MTSN 1 Batam	1	Unit	4.033.884.000	SBSN	Kota Batam	Kementerian Agama
81.	Kenduri Seni Melayu	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Batam Kota	Kementerian Pariwisata
82.	Bintan Triathlon	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Bintan	Kementerian Pariwisata
83.	*Wonderful* Indonesia *Crossborder Festival*	1	Kegiatan	2.000.000.000	APBN	Bintan	Kementerian Pariwisata
84.	*Jong Race* Festival	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Bintan	Kementerian Pariwisata
85.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Tabundung	1	Paket	4.572.978.096	APLN	Tabundung	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
86.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan	1	Paket	347.889.253	APLN	Laboya Barat	Kementerian Energi dan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Jaringan Listrik) Laboya Barat						Sumber Daya Mineral
87.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Kobalima Timur	1	Paket	2.290.252.977	APLN	Kobalima Timur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
88.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Kobalima	1	Paket	1.177.015.946	APLN	Kobalima	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
89.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Biboki Moenleu	1	Paket	200.075.870	APLN	Biboki Moenleu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
90.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Amfoang Timur	1	Paket	12.689.841.268	APLN	Amfoang Timur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
91.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Ndao Nuse	1	Paket	14.256.749.112	APLN	Ndao Nuse	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
92.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Lobalain	4	Paket	2.342.500.506	APLN	Lobalain	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
93.	Pengembangan Sumber Daya	1	Paket	1.660.670.800	APLN	Rote Barat	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Rote Barat Daya					Daya	Energi dan Sumber Daya Mineral
94.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Rote Barat	1	Paket	4.919.965.222	APLN	Rote Barat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
95.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Rote Timur	2	Paket	665.352.025	APLN	Rote Timur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
96.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Pantai Baru	4	Paket	1.331.615.019	APLN	Pantai Baru	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
97.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Sabu Timur	1	Paket	549.642.148	APLN	Sabu Timur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
98.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Hawu Mehara	1	Paket	189.775.732	APLN	Hawu Mehara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
99.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Ngadu Ngala	1	Paket	2.158.605.844	APLN	Ngadu Ngala	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
100.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Karera	1	Paket	1.906.406.593	APLN	Karera	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
101.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Pinu Pahar	1	Paket	3.358.827.229	APLN	Pinu Pahar	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
102.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Kodi Balaghar	1	Paket	6.144.016.483	APLN	Kodi Balaghar	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
103.	Operasional Terminal Barang Internasional Motaain	1	Paket	1.345.190.000	APBN	Belu	Kementerian Perhubungan
104.	Replacement Fasilitas Pelabuhan Salura (MYC 2025-2026)	1	Paket	75.500.000.000	APBN	Sumba Barat	Kementerian Perhubungan
105.	Pembangunan Gedung Stasiun Radio Pantai (SROP) Labuan Bajo Pada Disnav Kupang	1	Paket	4.098.727.000	APBN	Kupang	Kementerian Perhubungan
106.	Pembangunan Gedung Laboratorium Pengamatan Laut pada Disnav Kupang	1	Paket	1.329.771.000	PNBP	Kupang	Kementerian Perhubungan
107.	Pembangunan Gedung Stasiun Radio Pantai (SROP) Reo pada Disnav Kupang	1	Paket	1.567.474.000	PNBP	Kupang	Kementerian Perhubungan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
108.	Upgrade Peralatan GMDSS SROP Kupang pada Disnav Kupang	1	Paket	8.279.936.000	PNBP	Kupang	Kementerian Perhubungan
109.	Pengadaan Motor Tempel @250 PK untuk 1 Rigid Infitable Boat (RIB) pada Disnav Kupang	1	Paket	950.000.000	PNBP	Kupang	Kementerian Perhubungan
110.	*Replacement* Fasilitas Pelabuhan Salura Pada KSOP Waingapu (MYC 2026-2027)	1	Paket	25.000.000.000	PNBP	Sumba Barat	Kementerian Perhubungan
111.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Tukuneno	80	Unit	1.232.000.000	DAK	Tasifeto Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
112.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Kuki Talu	50	Unit	775.000.000	DAK	Tabundung	Kementerian Pekerjaan Umum
113.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kamalaputi Kec. Waingapu	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Sumba Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
114.	Pelatihan Vokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada BLK Disnakertrans Kab. Timur Tengah Utara	4	Paket	261.776.000	APBN	Timor Tengah Utara	Kementerian Ketenagakerjaan
115.	Pelatihan Vokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kab. Kupang	4	Paket	261.776.000	APBN	Kupang	Kementerian Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
116.	MAN Alor	1	Unit	10.506.000.000	SBSN	Alor	Kementerian Agama
117.	Wonderful Indonesia Crossborder Festival	1	Kegiatan	1.800.000.000	APBN	Timor Tengah Utara	Kementerian Pariwisata
118.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara	1	Unit	1.500.000.000	APBN	Sambas	Kementerian Dalam Negeri
119.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara	1	Unit	1.500.000.000	APBN	Bengkayang	Kementerian Dalam Negeri
120.	Pembangunan jalan sp. Take sp. Sontas	78.3	Km	154.600.000.000	SBSN	Entikong	Kementerian Pekerjaan Umum
121.	Pembangunan jalan Sp. Balai Karangan Rasau	31.68	Km	50.000.000.000	SBSN	Sanggau	Kementerian Pekerjaan Umum
122.	Pembangunan Jalan RASAU SP. NANGA KANTUK	77.95	Km	100.000.000.000	SBSN	Sintang	Kementerian Pekerjaan Umum
123.	Pembagunan jalan Nanga Era Bts. Prov. Kalimantan Barat/Bts. Prov.Kalimantan Timur	22.6	Km	49.669.175.000	SBSN	Kapuas Hulu	Kementerian Pekerjaan Umum
124.	Operasional Terminal Barang Internasional Entikong	1	Paket	2.038.340.000	APBN	Entikong	Kementerian Perhubungan
125.	Operasional Terminal Barang Internasional Nanga Badau	1	Paket	1.522.377.000	APBN	Badau	Kementerian Perhubungan
126.	Pengembangan Bandar Udara	1	Paket	7.381.400.000	APBN	Kapuas Hulu	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Pangsuma						Perhubungan
127.	Pengembangan Bandar Udara Tebelian	1	Paket	31.098.345.000	APBN	Sintang	Kementerian Perhubungan
128.	Pelatihan Vokasi Provinsi Kalimantan Barat pada UPT LLK UKM Disnakertrans Kab. Sintang	3	Paket	261.776.000	APBN	Sintang	Kementerian Ketenagakerjaan
129.	Pelatihan Vokasi Provinsi Kalimantan Barat pada UPTD BLK Kab. Sambas	2	Paket	130.888.000	APBN	Sambas	Kementerian Ketenagakerjaan
130.	Pelatihan Vokasi Provinsi Kalimantan Barat pada UPTD BLK Kab. Sambas	2	Paket	130.888.000	APBN	Sambas	Kementerian Ketenagakerjaan
131.	MIN Sanggau	1	Unit	1.840.143.000	SBSN	Sanggau	Kementerian Agama
132.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Long Pahangai	1	Paket	19.963.576.465	APLN	Long Pahangai	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
133.	Pembangunan jalan tering-long bagun	43.72	Km	88.001.000.000	SBSN	Mahakam Ulu	Kementerian Pekerjaan Umum
134.	Pembangunan jalan dan jembatan tering-long bagun (sp long hubung / tering - long bagun 6) Tahap 2	2.28	Km	33.550.225.000	SBSN	Mahakam Ulu	Kementerian Pekerjaan Umum
135.	Pembangunan jalan dan	1.86	Km	30.600.225.000	SBSN	Mahakam Ulu	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	jembatantering - long bagun (sp long hubung / tering - long bagun 7)						Pekerjaan Umum
136.	Pembangunan jalan dan jembatantering - long bagun (sp long hubung / tering - long bagun 8)	1.3	Km	39.600.225.000	SBSN	Mahakam Ulu	Kementerian Pekerjaan Umum
137.	MAN Berau	1	Unit	5.421.771.000	SBSN	Berau	Kementerian Agama
138.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara	1	Unit	1.500.000.000	APBN	Nunukan	Kementerian Dalam Negeri
139.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Kayan Hilir	1	Paket	25.849.714.566	APLN	Kayan Hilir	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
140.	Pembangunan jalan Tiong Ohang Long Pahangai	62.05	Km	310.400.000.000	SBSN	Malinau	Kementerian Pekerjaan Umum
141.	Pembangunan jalan Long Pahangai Long Boh	48.58	Km	412.240.000.000	SBSN	Malinau	Kementerian Pekerjaan Umum
142.	Pembangunan jalan Long Bagun Long Pahangai	85.78	Km	1.389.563.000.000	SBSN	Malinau	Kementerian Pekerjaan Umum
143.	Pembangunan jalan Malinau Long Semamu (Paking Semamu)	64.44	Km	172.922.000.000	SBSN	Malinau	Kementerian Pekerjaan Umum
144.	Pembangunan Jalan dan	1.6	Km	44.268.067.000	SBSN	Malinau	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	jembatan Malinau - Semamu 1						Pekerjaan Umum
145.	Pembangunan Jalan dan jembatan Malinau - Semamu 2	61	Km	47.171.671.000	SBSN	Malinau	Kementerian Pekerjaan Umum
146.	Layanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Lintas Nunukan-Tarakan Seimanggaris	1	Paket	8.399.543.000	APBN	Nunukan	Kementerian Perhubungan
147.	Layanan Angkutan Barang Perintis Pel. Nunukan - Kota	1	Layanan	6.840.676.000	RM	Nunukan	Kementerian Perhubungan
148.	Irau Malinau	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Malinau	Kementerian Pariwisata
149.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Wori	1	Paket	1.367.663.598	APLN	Wori	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
150.	*Replacement* Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026) UPP Tahuna	1	Paket	70.870.348.000	PNBP	Kepulauan Sangihe	Kementerian Perhubungan
151.	Replacement Fasilitas Pelabuhan Tahuna (MYC 2026-2027)	1	Paket	32.597.000.000	PNBP	Kepulauan Sangihe	Kementerian Perhubungan
152.	Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2026-2027)	1	Paket	70.893.854.000	PNBP	Kepulauan Sangihe	Kementerian Perhubungan
153.	MTSN 2 Bolaang Mongondow Utara	1	Unit	3.515.000.000	SBSN	Bolaang Mongondow Utara	Kementerian Agama

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
154.	Rehabilitasi dan Renovasi MTSS Istiqamah Dungingis	1	Unit	789.999.200	APBN	Dako Pemean	Kementerian Pekerjaan Umum
155.	Layanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Lintas Toli-Toli - Tarakan	1	Unit	5.948.363.636	APBN	Toli-Toli	Kementerian Perhubungan
156.	Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Dungingis	200	SR	1.400.000.000	DAK	Dako Pemean	Kementerian Pekerjaan Umum
157.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Mendaan	55	SR	792.810.000	DAK	Karamat	Kementerian Pekerjaan Umum
158.	Pelatihan Vokasi Provinsi Sulawesi Tengah pada UPTD LLK Kab. Toli-Toli	6	Paket	392.664.000	APBN	Toli-Toli	Kementerian Ketenagakerjaan
159.	Rehabilitasi dan Renovasi MIS Tudi	1	Unit	4.738.492.000	APBN	Monano	Kementerian Pekerjaan Umum
160.	Pengembangan Sumber Daya	1	Paket	1.590.226.826	APLN	Gentuma Raya	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Gentuma Raya						Energi dan Sumber Daya Mineral
161.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Tomilito	1	Paket	265.768.823	APLN	Tomilito	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
162.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Tolinggula Pantai	50	Unit	516.980.000	DAK	Tolinggula	Kementerian Pekerjaan Umum
163.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Aru Tengah Timur	1	Paket	24.981.640.235	APLN	Aru Tengah Timur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
164.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Aru Selatan Timur	1	Paket	54.000.532.545	APLN	Aru Selatan Timur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
165.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Kei Besar Selatan Barat	1	Paket	1.999.999.993	APLN	Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
166.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Sir-sir	1	Paket	26.619.577.265	APLN	Sir Sir	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
167.	Uprating IPA/Pembangunan IPA	127	SR	735.620.000	DAK	Kei Besar	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR), Desa Banda Efruan					Utara Timur	Pekerjaan Umum
168.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Watkidat	50	Unit	498.847.500	DAK	Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
169.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Uat	72	Unit	717.969.900	DAK	Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Pekerjaan Umum
170.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR), Kelurahan Lodar El	730	Unit	3.636.746.000	DAK	Pulau Dullah Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
171.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Taar	50	Unit	745.128.000	DAK	Pulau Dullah Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
172.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Kelurahan Lodar El	50	Unit	707.172.550	DAK	Pulau Dullah Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
173.	Pembangunan Tangki Septik Individual minimal 50 KK, Desa Tual	55	Unit	805.850.450	DAK	Pulau Dullah Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
174.	Peningkatan Fasilitas	1	Paket	30.000.000.000	PNBP	Kepulauan	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Pelabuhan Laut Saumlaki					Tanimbar	Perhubungan
175.	Rehabilitasi Fasilitas Utama Pelabuhan Marsela	1	Paket	2.947.316.000	PNBP	Maluku Barat Daya	Kementerian Perhubungan
176.	Rehabilitasi Fender Pelabuhan Tual	1	Paket	1.409.843.000	PNBP	Kota Tual	Kementerian Perhubungan
177.	Rehabilitasi Fender Pelabuhan Elat	1	Paket	1.150.199.000	PNBP	Maluku Tenggara	Kementerian Perhubungan
178.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Merah/Hijau Sistem Single Pipe 4 Kaki Lokasi Alur Masuk Pelabuhan TuaL	1	Paket	1.479.894.000	PNBP	Kota Tual	Kementerian Perhubungan
179.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Merah/Hijau Sistem Single Pipe 4 Kaki Lokasi Alur Masuk Pelabuhan Kobror	1	Paket	2.994.134.000	PNBP	Kepulauan Aru	Kementerian Perhubungan
180.	Festival Pesona Meti Kei	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Maluku Tenggara	Kementerian Pariwisata
181.	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Daruba	1	Paket	56.000.000.000	PNBP	Pulau Morotai	Kementerian Perhubungan
182.	Pengembangan Bandar Udara Pitu	1	Paket	2.300.000.000	PNBP	Pulau Morotai	Kementerian Perhubungan
183.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Warsa	1	Paket	881.896.561	APLN	Warsa	Kementerian Energi dan Sumber Daya

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
							Mineral
184.	Layanan Angkutan Perintis Jayapura-PBLN Skouw	1	Paket	274.704.000	APBN	Jayapura	Kementerian Perhubungan
185.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Pasi	88	SR	999.716.608	DAK	Aimando Padaido	Kementerian Pekerjaan Umum
186.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Yensama	49	SR	768.058.879	DAK	Oridek	Kementerian Pekerjaan Umum
187.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Nusi Babaruk	41	SR	608.949.302	DAK	Padaido	Kementerian Pekerjaan Umum
188.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/	35	SR	858.939.975	DAK	Yawosi	Kementerian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR), Desa Madirai						Pekerjaan Umum
189.	Pelatihan Vokasi Provinsi Papua pada BLK Keerom	4	Paket	261.776.000	APBN	Keerom	Kementerian Ketenagakerjaan
190.	Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Sarmi	1	Unit	58.295.193.109	APBN	Sarmi Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum
191.	Operasional TBI Skouw	1	Paket	1.375.448.000	RM	Jayapura	Kementerian Perhubungan
192.	MIN Kota Jayapura	1	Unit	5.136.000.000	SBSN	Kota Jayapura	Kementerian Agama
193.	Aktivasi Ruang Kreatif	40	Orang	163.000.000	APBN	Papua	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif
194.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Laboya Barat	1	Paket	1.371.958.202	APLN	Agats	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
195.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Minyamur	1	Paket	4.456.313.700	APLN	Minyamur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
196.	Pembangunan Jalan IWUR WAROPKO (PAPUA SELATAN)	25.9	Km	49.625.000.000	SBSN	Boven Digoel	Kementerian Pekerjaan Umum
197.	Pembangunan Jalan Oksibil-Iwur	25	Km	90.000.000.000	SBSN	Boven Digoel	Kementerian Pekerjaan Umum
198.	Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil II	5.5	Km	72.000.000.000	SBSN	Boven Digoel	Kementerian Pekerjaan Umum
199.	Pengembangan Bandar Udara Mopah Merauke Papua Selatan - Kab. Merauke	1	Paket	20.000.000.000	APBN	Merauke	Kementerian Perhubungan
200.	Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kaya Kec. Agats	1	Paket	22.000.000.000	APBN	Asmat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
201.	Angkutan Udara Perintis Penumpang 11 Rute	1	Paket	36.800.000.000	RM	Merauke	Kementerian Perhubungan
202.	Replacement Fasilitas Pelabuhan Agats	1	Paket	58.000.000.000	PNBP	Asmat	Kementerian Perhubungan
203.	Rehabilitasi Pagar Taman Pelampung 207 m Konstruksi Beton	1	Paket	2.146.078.000	PNBP	Merauke	Kementerian Perhubungan
204.	Pengadaan dan Pemasangan GMDSS untuk SROP Agats	1	Paket	9.000.000.000	PNBP	Merauke	Kementerian Perhubungan
205.	Pengadaan dan Pemasangan AIS Base Station untuk SROP Bade	1	Paket	2.853.603.000	PNBP	Merauke	Kementerian Perhubungan
206.	Layanan Angkutan Perintis Pelabuhan Merauke-Boven	1	Layanan	3.100.000.000	RM	Merauke	Kementerian Perhubungan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	Digoel						
207.	MTSN Merauke	1	Unit	4.913.000.000	SBSN	Merauke	Kementerian Agama
208.	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan (Perluasan Jaringan Listrik) Jita	1	Paket	24.698.256.405	APLN	Jita	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
209.	Timika Inside Festival of Art	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Mimika	Kementerian Pariwisata
210.	Pembangunan Jalan Jalan Towe Hitam-Oksibil II	30.5	Km	28.150.000.000	SBSN	Pegunungan Bintang	Kementerian Pekerjaan Umum
211.	Pembangunan Jalan Iwur-Waropko Segmen II	4.79	Km	60.750.000.000	SBSN	Pegunungan Bintang	Kementerian Pekerjaan Umum
212.	Festival Pesona Raja Ampat	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Raja Ampat	Kementerian Pariwisata

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN